

TESIS

**GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN SEKTOR
AIR MINUM DI PERUMDA TIRTA MANGKALUKU KOTA
PALOPO**

*GOOD GOVERNANCE NATURE MANAGEMENT OF THE
DRINKING WATER SECTOR IN PERUMDA TIRTA
MANGKALUKU PALOPO CITY*

NOVITA SARI BASMIN

E 062 21 1007



**MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

**GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN SEKTOR
AIR MINUM DI PERUMDA TIRTA MANGKALUKU KOTA
PALOPO**

*GOOD GOVERNANCE NATURE MANAGEMENT OF THE
DRINKING WATER SECTOR IN PERUMDA TIRTA
MANGKALUKU PALOPO CITY*

TESIS

Diajukan Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister

Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan

Disusun dan diajukan oleh:

NOVITA SARI BASMIN

E 062 21 1007

Kepada

**MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

TESIS

**GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN SEKTOR AIR
MINUM DI PERUMDA TIRTA MANGKALUKU KOTA PALOPO**

Disusun dan diajukan oleh

NOVITA SARI BASMIN

E062 21 1007

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
pada tanggal **09 Februari 2023**
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Ketua Penasehat

Prof. Dr. Nurlinah, M.Si.
NIP. 196309211987022001

Anggota Penasehat

Dr. Andi Lukman Irwan, M.Si.
NIP. 197901062005011001

Mengetahui

Plt. Ketua Program Studi Magister
Ilmu Pemerintahan

Dr. A.M. Rusli, M.Si.
NIP. 19640727991031001

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Dr. Phil. Sukri, S.IP., M.Si.
NIP. 197508182008011008

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Novita Sari Basmin

Nim : E06221 007

Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tesis yang saya tulis benar-benar merupakan hasil karya sendiri bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran dari orang lain. Apabila ditemukan atau terbukti dan dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain. Saya siap menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 09 Februari 2023

Yang menyatakan



Novita Sari Basmin

ABSTRAK

NOVITA SARI BASMIN *Good Governance dalam Pengelolaan Sektor Air Minum di Perumda Tirta Mangkaluku Kota Palopo* (dibimbing oleh Nurlinah dan A. Lukman Irwan)

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis Good Governance dalam Pengelolaan Sektor Air Minum di Perumda Tirta Mangkaluku Kota Palopo . Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Adapun lokasi penelitian ini di Kota Palopo Sulawesi Selatan. Sementara jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, kajian pustaka, Dokumen/arsip, dan Dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan Perumda Tirta Mangkaluku Kota Palopo telah dilakukan sudah disesuaikan dengan Standar Pelayanan Publik meliputi Tranparansi, Akuntabilitas, Efisiensi dan efektivitas serta responsivitas sebagaimana Prinsip Good Governance menurut Adisasmita, akan tetapi penerapan prinsip-prinsip belum berjalan dengan optimal sementara Hambatan dalam penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan di Perumda Tirta Mangkaluku Kota Palopo terdapat dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal yaitu kurangnya pemahaman karyawan terhadap prinsip-prinsip good governance, kurangnya disiplin aparatur di waktu jam kerja, sedangkan faktor eksternal kurangnya partisipasi masyarakat.

Kata Kunci: *Good Governance, Perusahaan Daerah, Kota Palopo*

ABSTRAC

NOVITA SARI BASMIN Good Governance Nature Management of the Drinking Water Sector di Perumda Tirta Mangkaluku Palopo City (guided by Nurlinah and A. Lukman Irwan)

This study aims to study and analyze Good Governance in the Management of the Drinking Water Sector in Perumda Tirta Mangkaluku, Palopo City . The type of research used is qualitative research. The location of this study is in Palopo City, South Sulawesi. While the data types used are primary data and secondary data. The data collection techniques used are interviews, literature review, documents/archives, and documentation. The data analysis technique used is qualitative analysis. The results of the study show that the application of the principles of good governance in the service of regional companies Tirta Mangkaluku Palopo City has been carried out in accordance with Public Service Standards including Transparency, Accountability, Efficiency and effectiveness and responsiveness as the Principles of Good Governance according to Adisasmita, but the application of the principles has not yet been implemented optimally while the obstacles in applying the principles of good governance in services at Perumda Tirta Mangkaluku City of Palopo are two factors, namely internal factors and external factors, internal factors namely the lack of understanding of employees towards the principles of good governance, lack of discipline of the apparatus during working hours , while the external factor is the lack of community participation

Keywords: *Good Governance, Regional Companies, Palopo City*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran ALLAH SWT yang telah memberikan kesehatan, kesempatan sehingga bisa menyelesaikan Tesis judul "Good Governance dalam Pengelolaan Sektor Air Minum di Perumda Tirta Mangkaluku Kota Palopo" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Hasanuddin. Tak lupa pula penulis kirimkan shalawat salam atas junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam yang gelap menuju alam yang terang benderang seperti sekarang kita. Dalam Kesempatan kali ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua yang telah dahulu berpulang ke rahmatullah yang telah membesarkan dan mendidik saya dengan penuh kasih sayang, serta ketulusan hati tanpa pamrih memberikan bantuan materil dan moril, selalu memberi semangat, berkat kekuatan doa luar biasa yang setiap saat beliau haturkan kepada penulis agar selalu mencapai kemudahan disegala urusan, diberi kesehatan dan perlindungan oleh Allah SWT.

Tesis ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya Bapak (alm) H. Muh.Basmin M. dan Ibu (Almh) Hj. Norma Madjid yang telah melahirkan dan membesarkan saya semoga tenang disurga. Dan

tesis ini pula tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak dan oleh karena itu maka melalui kesempatan ini penulis menghaturkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Si selaku Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan Magister (S-2) di Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Dr. Phil. Sukri, SIP, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta seluruh stafnya yang telah banyak memberikan bantuan serta masukan kepada penulis.
3. Dr. A.H.M. Rusli.,M.Si selaku Plt. Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan seluruh staf karyawan di lingkungan Prodi Ilmu Pemerintahan atas segala saran dan masukan yang diberikan pada penulis selama perkuliahan.
4. Ibu Prof. Dr. Hj. Nurlinah, M.Si dan Bapak Dr. A. Lukman Irwan.,S.IP.,M.Si selaku Pembimbing penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin yang telah rela mengorbankan waktunya untuk membimbing penulis, memberi arahan, saran, dan kritikan terhadap penyusunan Tesis ini.
5. Para tim penguji Ibu Prof. Dr. Rabina Yunus.,M.Si, Bapak Dr. H. A. M. Rusli.,M.Si dan Bapak Dr. H. Suhardiman Syamsu.,M.Si yang telah banyak memberikan masukan dan saran dalam upaya penyempurnaan tesis ini.

6. Seluruh Dosen Pasca Sarjana Magister Ilmu Pemerintahan, Bapak Prof. Dr. Juanda Nawawi.,M.Si, Ibu Prof. Dr. Nurlinah.,M.Si, Bapak Prof. Dr. Rasyid Thaha.,M.Si, Ibu Prof. Dr. Rabina Yunus.,M.Si, Bapak Dr. H. A. M. Rusli.,M.Si, Bapak Dr. H. Suhardiman Syamsu.,M.Si, Ibu Dr. Indar Arifin.,M.Si, Bapak Dr. A. Lukman Irwan.,S.IP.,M.Si, Prof. Dr. Armin.,M.Si, dan Dr. Phil Sukri.,M.Si. terima kasih atas ilmu yang telah diberikan dan semoga bermanfaat bagi penulis.
7. Seluruh Karyawan/Staf Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan ilmu, nasehat, melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya.
8. Terima Kasih kepada Seluruh informan penulis serta semua yang terlibat dalam pengumpulan data maupun informasi yang menunjang penelitian ini.
9. Kepada kakak-kakak Penulis yang sangat dicintai dan disayangi H. M.Jaya.,SH.M.Si, Dr. H. M.Rasyid Ridha.,M.Hum., dr. H. Rusdi Basmin.,M.Kes, Mawardi,S.Apt, Naima Basmin, S.Sos, Fahriah Basmin, Rusdiati Basmin,SE, Fatmawati B, Amd. Kep, Muh.Basnur, S.Sos, Muh.Salim Basmin, SH, MH, terima kasih telah memberikan motivasi, dan selalu memberi semangat, dukungan dan materiil serta senantiasa menghaturkan doa dari dulu hingga saat ini yang tiada hentinya.
10. Kepada anakku tercinta Kayla Alifia Masse dan Fadel Muhammad Maulana yang penulis sayangi yang selalu menjadi sumber spirit dan

motivasi atas kesabaran dan pengertiannya serta memberikan Doa dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan Tesis.

11. Kepada adik-adik seperjuangan Magister Ilmu Pemerintahan Angkatan 2021 Saudaraku Fathur Rahman Marhas, Kemal Pasha, Rivaldi, Musakkar, Jum Harianto, Arfan, Muh. Gemilang Pagessa, dan Ramdhany Utami. Terima kasih atas kerjasamanya selama ini.
12. Kepada seluruh keluarga besar yang telah banyak memberikan support baik itu moril dan materil, terima kasih banyak penulis ucapkan.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis.

Akhir kata, penulis mengucapkan permohonan maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Terima Kasih, Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Penulis

Novita Sari Basmin

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN SAMPUL	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	i
ABSTRACT	6
KATA PENGANTAR	8
DAFTAR ISI	9
DAFTAR TABEL	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR GAMBAR	Error! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN	10
1.1. Latar Belakang.....	10
1.2. Rumusan Masalah.....	18
1.3. Tujuan Penelitian	19
1.4. Manfaat Penelitian	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1. Good Governance	11
2.1.1. Pengertian Good Governance.....	11
2.1.2. Asas-Asas Good Governance.....	15
2.1.3. Prinsip-Prinsip Good Governance.....	17
2.1.4. Tujuan Penerapan Good Governance	35
2.2. Pengelolaan.....	38
2.2.1. Pengertian Pengelolaan	38
2.2.2. Unsur-Unsur Manajemen	44
2.2.3. Fungsi-Fungsi Manajemen.....	47
2.3. Kerangka Pikir	49
BAB III METODE PENELITIAN	52
3.1. Pendekatan dan jenis Penelitian.....	52
3.1.1. Pendekatan Penelitian.....	52

3.2. Lokasi Penelitian.....	53
3.3. Sumber Data	53
3.3.1. Data Primer	53
3.3.2. Data Sekunder	53
3.4. Informan	54
3.5. Teknik Pengumpulan Data	56
3.5.1. Observasi.....	56
3.5.2. Wawancara (Interview)	56
3.5.3. Dokumen dan Arsip.....	57
3.6. Fokus Penelitian	57
3.7. Teknik Analisis Data	59
BAB IV GAMBARAN UMUM DAN HASIL PENELITIAN.....	61
4.1. Profil (PERUMDA) Tirta Mangkaluku Kota Palopo	61
4.1.1. Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kota Palopo	67
4.1.2. Struktur Organisasi	73
4.1.3. Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM).....	89
4.2. Hasil Penelitian Good Governance dalam Pengelolaan Sektor Air Minum di Perumda Tirta Mangkaluku Kota Palopo.....	90
4.2.1. Transparansi	90
4.2.2. Akuntabilitas	101
4.2.3. Efisiensi dan Efektivitas	112
4.2.4. Responsivitas	119
4.2.5. Hambatan-hambatan apa yang ditemui dalam penerapan prinsip-prinsip <i>Good Governance</i>	121
BAB V PENUTUP.....	126
5.1. Kesimpulan	126
5.2. Saran	126
DAFTAR PUSTAKA.....	128
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	130

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tingkat Kebocoran Air PDAM Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020	8
Tabel 4.1. Jumlah Karyawan Perusahaan Umum Daerah Tirta Mangkaluku Kota Palopo	90
Tabel 4.2. Standar Operasional Pindah Wilayah	96
Tabel 4.3. Standar Operasional Penyelesaian Pindah Golongan	97
Tabel 4.4. Standar Operasional Penyelesaian Pengaduan	99
Tabel 4.5. Standar Operasional Buka Kembali Tutup Sementara	100
Tabel 4.6. Laporan Keuangan Laba Rugi Perusahaan Umum Daerah Tirta Mangkaluku Kota Palopo	104
Tabel 4.7. Data Pelanggan Perusahaan Umum Daerah Tirta Mangkaluku Kota Palopo Berdasarkan Golongan	115
Tabel 4.8 Data Pelanggan Perusahaan Umum Daerah Tirta Mangkaluku Kota Palopo Berdasarkan Tingkat Kecamatan	115

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Bagan Kerangka Pikir	51
Gambar 4.1. Perumda Tirta Mangkaluku Kota Palopo	77
Gambar 4.2. Keterbukaan Informasi Perumda Tirta Mangkaluku	93
Gambar 4.3. Rekap Absensi Bulan Desember PERUMDATirta Mangkaluku Kota Palopo	112
Gambar 4.4 Skematik Spam PERUMDA	117
Gambar 4.5. Skematik Pelayanan Air Bersih IPAM 1 Abd Madjid	117
Gambar 4.6. Skematik Pelayanan Air Bersih IPAM 2 Magandang	117
Gambar 4.7. Skematik Pelayanan Air Bersih IPAM 3 Battang	118
Gambar 4.8. Skematik Pelayanan Air Bersih IPAM 4 Mungkajang	118
Gambar 4.9. Skematik Pelayanan Air Bersih IPAM 5 Batupapan	119

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Good Governance adalah “mantra” yang diucapkan oleh banyak orang di Indonesia sejak 1993. Kata governance mewakili suatu etika baru yang terdengar rasional, profesional, dan demokratis, tidak soal apakah diucapkan di kantor Bank Dunia di Washington, AS atau di kantor LSM yang kumuh di pinggiran Jakarta. Dengan kata itu pula wakil dari berbagai golongan profesi seolah disatukan oleh “koor seruan” kepada pemerintah yang korup di negara berkembang. “Good Governance, bad men!” terkepeng oleh seruan dari berbagai pihak, kalangan pejabat pemerintah pun lantas juga fasih menyebut konsep ini, meski dengan arti dan maksud yang berbeda.

Proses pemahaman umum mengenai governance atau tata pemerintahan mulai mengemuka di Indonesia sejak tahun 1990- an, dan mulai semakin bergulir pada tahun 1996, seiring dengan interaksi pemerintah Indonesia dengan negara luar sebagai negara-negara pemberi bantuan yang banyak menyoroti kondisi obyektif perkembangan ekonomi dan politik Indonesia. Istilah ini seringkali disangkutpautkan dengan kebijaksanaan pemberian bantuan dari negara donor, dengan menjadikan masalah isu tata pemerintahan sebagai salah satu aspek yang dipertimbangkan dalam pemberian bantuan, baik berupa pinjaman maupun hibah. Kata governance

sering dirancukan dengan government. Akibatnya, Negara dan pemerintah menjadi korban utama dari seruan kolektif ini, bahwa mereka adalah sasaran nomor satu untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Badan-badan keuangan internasional mengambil prioritas untuk memperbaiki birokrasi pemerintahan di Dunia Ketiga dalam skema good governance mereka. Aktivitis dan kaum oposan, dengan bersemangat, ikut juga dalam aktivitas ini dengan menambahkan prinsip-prinsip kebebasan politik sebagai bagian yang tak terelakkan dari usaha perbaikan institusi negara. Good Governance bahkan berhasil mendekatkan hubungan antara badan-badan keuangan multilateral dengan para aktivis politik, yang sebelumnya bersikap sinis pada hubungan antara pemerintah Negara berkembang dengan badan-badan ini. Maka, jadilah suatu sintesa antara tujuan ekonomi dengan politik. Tetapi, sebagaimana layaknya suatu mantra, para pengucap tidak dapat menerangkan sebab akibat dari suatu kejadian, Mereka hanya mengetahui sebagian, yaitu bahwa sesuatu yang invisible hand menyukai mantra yang mereka ucapkan. Pada kasus Good Governance, para pengucap hanya mengetahui sedikit hal yaitu bahwa sesuatu yang tidak terbuka dan tidak terkontrol akan mengundang penyalahgunaan, bahwa program ekonomi tidak akan berhasil tanpa legitimasi, ketertiban sosial, dan efisiensi institusional. Satu faktor yang sering dilupakan adalah, bahwa kekuatan konsep ini

justru terletak pada keaktifan sektor negara, masyarakat dan pasar untuk berinteraksi. Karena itu, Good Governance, sebagai suatu proyek sosial, harus melihat kondisi sektor-sektor di luar negara.

Good Governance sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrasi, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Meskipun mengakui ada banyak aktor yang terlibat dalam proses sosial, governance bukanlah sesuatu yang terjadi secara chaotic, random atau tidak terduga. Ada aturan-aturan main yang diikuti oleh berbagai aktor yang berbeda. Salah satu aturan main yang penting adalah adanya wewenang yang dijalankan oleh negara. Tetapi harus diingat, dalam konsep governance wewenang diasumsikan tidak diterapkan secara sepihak, melainkan melalui semacam konsensus dari pelaku-pelaku yang berbeda. Oleh sebab itu, karena melibatkan banyak pihak dan tidak bekerja berdasarkan dominasi pemerintah, maka pelaku-pelaku diluar pemerintah harus memiliki kompetensi untuk ikut membentuk, mengontrol, dan mematuhi wewenang yang dibentuk secara kolektif. Lebih lanjut, disebutkan bahwa dalam konteks pembangunan, definisi governance adalah “mekanisme

pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial untuk tujuan pembangunan”, sehingga Good Governance, dengan demikian, “adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang substansial dan penerapannya untuk menunjang pembangunan yang stabil dengan syarat utama efisien) dan (relatif) merata.” Menurut dokumen United Nations Development Program (UNDP), tata pemerintahan adalah: Penggunaan wewenang ekonomi politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan di antara mereka. Jelas bahwa Good Governance adalah masalah perimbangan antara negara, pasar dan masyarakat. Memang sampai saat ini, sejumlah karakteristik kebaikan dari suatu governance lebih banyak berkaitan dengan kinerja pemerintah. Pemerintah berkewajiban melakukan investasi untuk mempromosikan tujuan ekonomi jangka panjang seperti pendidikan kesehatan dan infrastruktur. Tetapi untuk mengimbangi negara, suatu masyarakat warga yang kompeten dibutuhkan melalui diterapkannya sistem demokrasi, rule of law, hak asasi manusia, dan dihargainya pluralisme. Good Governance sangat terkait dengan dua hal yaitu (1) Good Governance tidak

dapat dibatasi hanya pada tujuan ekonomi dan (2) tujuan ekonomi pun tidak dapat dicapai tanpa prasyarat politik tertentu.

Sumodiningrat (1999:251) menyatakan Good Governance adalah upaya pemerintahan yang amanah dan untuk menciptakan Good Governance, pemerintahan perlu didesentralisasi dan sejalan dengan kaidah penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Definisi lain menyebutkan governance adalah mekanisme pengelolaansumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sector negaradan sector non-pemerintah dalam suatu usaha kolektif. Mardiasmo (2002:18).

Membangun Good Governance adalah mengubah cara kerja state, membuat pemerintah accountable, dan membangun pelaku-pelaku di luar negara cakap untuk ikut berperan membuat sistem baru yang bermanfaat secara umum. Dalam konteks ini, tidak ada satu tujuan pembangunan yang dapat diwujudkan dengan baik hanya dengan mengubah karakteristik dan cara kerja institusi negara dan pemerintah. Harus kita ingat, untuk mengakomodasi keragaman, good governance juga harus menjangkau berbagai tingkat wilayah politik. Karena itu, membangun good governance adalah proyek sosial yang besar. Agar realistis, usaha tersebut harus dilakukan secara bertahap. Untuk Indonesia, fleksibilitas dalam memahami konsep ini diperlukan agar dapat menangani realitas yang ada Berdasarkan uraian sebelumnya jelas

teridentifikasi betapa pentingnya good governance dalam penyelenggaraan negara. Berikut ini akan dikemukakan beberapa butir tentang bagaimana membangun manajemen publik yang bercirikan good governance, antara lain: Organisasi sektor publik agar memperhatikan value for money dalam menjalankan aktivitasnya. Value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu: ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (Mardiasmo, 2002:4). Value for money, dapat tercapai apabila organisasi telah menggunakan biaya input paling kecil untuk mencapai output yang optimum dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Implementasi konsep value for money diyakini dapat memperbaiki akuntabilitas sektor publik dan kinerja sektor publik. Manfaat implementasi konsep value for money pada organisasi sektor publik antara lain: a) Meningkatkan efektivitas pelayanan publik dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran. b) Meningkatkan mutu pelayanan publik. c) Menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan terjadinya penghematan dalam penggunaan input. d) Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik. e) Meningkatkan kesadaran akan uang publik (*public costs awareness*) sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik.

Salah satu perusahaan yang wajib menerapkan Good Governance adalah Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana

tercakup dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. UU tersebut menyebutkan bahwa pengelolaan BUMD harus memenuhi beberapa unsur termasuk tata kelola perusahaan yang baik (Pasal 343). Hal ini mempertegas bahwa *Good Governance* merupakan unsur yang harus ada dalam pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dengan ***Fokus Corporate Governance***.

Perusahaan Daerah Air Minum merupakan salah satu perusahaan milik pemerintah daerah dan sebagai penyedia air bersih. PDAM mempunyai tujuan yang tidak berbeda dengan perusahaan lain yaitu keberhasilan dalam mempertahankan hidup, memperoleh laba, menjadi penyedia layanan bagi kepentingan masyarakat, serta keberhasilan untuk terus berkembang. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan dukungan semua bagian yang ada di dalam PDAM demi kelancaran operasi dan pencapaian tujuan perusahaan melalui penerapan *Good Governance*.

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh beberapa PDAM di Provinsi Sulawesi Selatan adalah tingginya tingkat kebocoran air. Permasalahan tersebut disebabkan oleh beberapa hal yang termasuk diantaranya adalah kurang efektifnya pelaksanaan *Good Governance*. Berikut data tingkat kebocoran air PDAM di beberapa kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020.

**Tabel 1.1 Tingkat Kebocoran Air PDAM Di Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2020**

No	PDAM	Tingkat Kebocoran Air (%)
1	PERUMDA TM Palopo	36,61
2	PDAM Bantaeng	35,98
3	PDAM Luwu Utara	35,53
4	PDAM Jeneponto	34,81
5	PDAM Barru	30,70
6	PDAM Gowa	30,69
7	PDAM Pangkep	28,39
8	PDAM Luwu	27,66
9	PDAM Bulukumba	23,66
10	PDAM Sinjai	22,59
11	PDAM Toraja Utara	22,30
12	PDAM Takalar	18,49
13	PDAM Bone	5,92

Sumber Data: BPKP Perwakilan Sulsel

Tabel 1.1 menyajikan tingkat kebocoran air yang tertinggi terjadi pada Perumda Tirta Mangkaluku Kota Palopo sedangkan tingkat kebocoran air yang terendah terjadi pada PDAM Bone.

Permasalahan tersebut disebabkan oleh beberapa hal yang termasuk diantaranya adalah kurang efektifnya pelaksanaan *Good Governance*. Hal ini terlihat dari hasil *Assesment Good Governance* PDAM Palopo Tahun 2021 yang dilakukan oleh BPKP berdasarkan Laporan Nomor LAP- 453/PW21/4/2021 tanggal 27 Juni 2021 dengan skor 32,63 yang termasuk dalam katagori tidak baik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti akan menganalisis seperti apa penerapan *Good Governance* dalam sektor layanan air minum di PERUMDA Tirta Mangkaluku Kota Palopo, mengingat faktor tersebut dalam menjamin keberlangsungan hidup perusahaan merupakan hal yang sangat penting.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mengambil judul dalam Tesis ini yaitu "Good Governance dalam sektor layanan air minum PERUMDA Tirta Mangkaluku Kota Palopo".

1.2. Rumusan Masalah.

Dengan melihat latar belakang yang dikemukakan di atas Peneliti ingin mengetahui bagaimana penerapan prinsip *Good Governance* yang diberlakukan dalam pengelolaan sektor air minum pada Perusahaan Umum Daerah Tirta Mangkaluku Kota Palopo. Untuk mengarahkan penelitian ini maka pertanyaan penelitian disusun sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan prinsip Good Governance yang diberlakukan dalam pengelolaan sektor air minum PERUMDA Tirta Mangkaluku Kota Palopo?
2. Hambatan-hambatan apa yang ditemui dalam penerapan prinsip-prinsip Good Governance dalam pengelolaan sektor air minum Perusahaan Umum daerah Kota Palopo

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan Penelitian di atas, peneliti menurunkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis penerapan Good Governance yang diberlakukan dalam pengelolaan sektor layanan air minum Perusahaan Umum Daerah Tirta Mangkaluku Kota Palopo
2. Untuk mengkaji dan menganalisis hambatan-hambatan apa saja yang ditemui dalam menerapkan prinsip Good Governance dalam pengelolaan sektor air minum PERUMDA Tirta Mangkaluku Kota Palopo.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Secara akademis, penelitian diharapkan dapat bermanfaat sebagai karya ilmiah yang menunjang perkembangan ilmu pengetahuan khususnya perkembangan ilmu Pemerintahan dalam *Good Governance*

2. Secara praktis, penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi Perusahaan Umum Daerah Tirta Mangkaluku Kota Palopo dalam menjalankan prinsip-prinsip Good Governance dengan baik.
3. Secara metodologi, penelitian diharapkan sebagai bahan yang dapat mendukung bagi peneliti maupun pihak lain yang tertarik dalam bidang penelitian yang sama khususnya terkait Good Governance.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Good Governance

2.1.1. Pengertian Good Governance

Good Governance artinya pemerintahan yang baik yaitu tata pemerintahan yang menaati hukum, menghormati HAM, menghargai nilai-nilai dasar yang dianut oleh masyarakat, secara sadar dan sistematis membangun fasilitas untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat, bersikap egaliter, dan menghormati keragaman termasuk etnis, agama, suku, dan budaya lokal (Nurcholis, 2007:300).

Sedangkan menurut Keraf dan Akadun mengartikan good governance sebagai adanya dan berfungsi baiknya beberapa perangkat kelembagaan sedemikian rupa sehingga memungkinkan kepentingan masyarakat bisa dijamin dengan baik (Kartika dkk, 2012:11).

Sementara itu World Bank mendefinisikan good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab serta sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha (Mustafa, 2013:186).

Berdasarkan beberapa pendapat para tokoh terkait pengertian good governance khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka dapat disimpulkan bahwa good governance adalah suatu

penyelenggaraan pemerintahan yang bertanggung jawab dan menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat sehingga sehingga sumber daya pendukung kepada lembaga dan aparat yang dibawahnya untuk mengambil keputusan dan memecahkan masalah secara efektif dan efisien.

Sementara menurut Daniri (2006) secara harfiah, governance kerap diterjemahkan sebagai “pengaturan”. Adapun dalam konteks good governance, governance sering juga disebut “tata pamong”, atau penadbiran yang terakhir ini, bagi orang awam masih terdengar janggal di telinga. Karena istilah itu berasal dari kata Melayu.

Alijoyo (2004) menyebutkan governance dalam arti sempit pada dasarnya berbicara tentang dua aspek yakni, governance structure atau board structure dan governance process atau governance mechanism pada suatu perusahaan. Governance structure adalah struktur hubungan pertanggungjawaban dan pembagian peran diantara berbagai organ utama perusahaan yakni Pemilik/Pemegang Saham, Pengawas/Komisaris, dan Pengelola/Direksi/Manajemen. Sedangkan governance process membicarakan tentang mekanisme kerja dan interaksi aktual di antara organ- organ tersebut. Meskipun pada dasarnya governance process dipengaruhi oleh governance structure, mekanisme kerja dan interaksi aktual diantara organ-organ korporasi dapat berjalan menyimpang dari struktur yang ada.

Turnbull (1997) seperti yang dikutip oleh Syakhroza mendefinisikan governance dari berbagai macam disiplin ilmu misalnya

hukum, psikologi, ekonomi, manajemen, keuangan, akuntansi, filsafat bahkan dalam disiplin ilmu agama. Oleh karena itu seringkali kita melihat beberapa pakar mendefinisikan governance secara eksplisit berbeda. Turnbull mendefinisikan governance sebagai berikut:

“Governance describes all the the influences affecting the insttutional processes including those for appointing the controllers and/or regulators, involved in organizing the production and sale of goods and services.”

Turnbull lebih menekankan bagaimana melakukan tata kelola dalam sebuah organisasi dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi kepada proses organisasi dalam rangka menghasilkan dan menjual barang atau jasa. Disamping itu, Turnbull juga berpendapat bahwa penunjukkan controllers dan regulators merupakan juga substansi penting dalam membangun good governance.

Sementara itu, OECD (Organizational for Economic Corporation and Development) mendefinisikan good governance sebagai berikut:

“Governance is the systems by which organizations is directed and controlled. The Good Governance structure specifies the distribution of the right and responsibilities among different participants in the organization, such as the board, managers, shareholders, society, and the other stakeholders, and spells out the rules and procedures for making decisions on organization affairs. By doing this, it also provides this structure through which

the organization objectives are set, and the means of attaining those objectives and monitoring performance.”

Definisi governance menurut OECD ini adalah melihat governance sebagai suatu sistem dimana sebuah perusahaan atau entitas bisnis diarahkan dan diawasi, pengertian ini konsisten dengan Turnbull dimana keduanya fokus kepada bagaimana organisasi itu bisa berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Jubaedah (2007), mengutip dari Cadbury (Stijn Claessens: 2003) menyatakan bahwa governance berhubungan erat dengan upaya untuk mempertahankan keseimbangan antara tujuan ekonomi dengan sosial dan antara tujuan individual dengan tujuan secara bersama dari suatu perusahaan atau entitas usaha.

Sedangkan menurut FCGI (Forum for Corporate Governance in Indonesia) good governance didefinisikan sebagai seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak- hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.

Menurut UNDP tentang definisi good governance adalah sebagai hubungan yang sinergis dan konstruktif diantara Negara, sektor swasta dan masyarakat, dalam prinsip-prinsip. partisipasi, supremasi hukum, transparansi, cepat tanggap, membangun konsesus, kesetaraan, efektif dan efisien, bertanggungjawab serta visi strategik. Good governance

dimaknai sebagai praktek penerapan kewenangan penerapan pengelolaan berbagai urusan penyelenggaraan negara secara politik, ekonomi dan administratif di semua tingkatan. Ada tiga pilar good governance yang penting, yaitu:

1. Economic governance atau kesejahteraan rakyat
2. Political governance atau proses pengambilan keputusan
3. Administrative governance atau tata laksana pelaksanaan kebijakan

Jika dikaitkan dengan tata kelola Pemerintahan maka good governance adalah suatu gagasan dan nilai untuk mengatur pola hubungan antara pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat sehingga terjadi penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, demokratis, dan efektif sesuai dengan cita-cita terbentuknya suatu masyarakat yang makmur, sejahtera dan mandiri

2.1.2. Asas-Asas Good Governance

Asas pemerintahan yang baik merupakan bagian yang paling penting karena asas pemerintahan yang baik ini diibaratkan seperti rambu lalu lintas di jalan raya jika tidak ada rambu lalu lintas akan terjadi kekacauan dalam berkendara sama halnya jika tidak ada asas akan terjadi kekacauan dalam suatu pemerintahan karena asas-asas diperlukan untuk memperlancar hubungan pemerintahan (lalu lintas pemerintahan antara pemerintah dengan yang diperintah atau warga masyarakat).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi,

dan Nepotisme, ditetapkan tujuh asas penyelenggaraan negara yang baik yaitu:

1. Asas kepastian hukum, yaitu asas yang mengutamakan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara,
2. Asas tertib penyelenggaraan negara, yaitu asas yang mengutamakan keteraturan, keserasian, dan kesinambungan dalam pengendalian dan penyelenggaraan negara,
3. Asas kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan yang aspiratif, akomodatif dan selektif,
4. Asas keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara,
5. Asas proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara,
6. Asas profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
7. Asas akuntabilitas, yaitu asas dimana setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai

pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Mustafa, 2013:199)

2.1.3. Prinsip-Prinsip Good Governance

Semangat reformasi politik di Indonesia telah memunculkan terminologi baru yang disebut good governance. Popularitas terminologi ini mencuat di kalangan Pemerintah, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat. Secara sederhana governance sebagai Tata Pemerintahan, sedangkan good artinya baik. Penambahan kata sifat good dalam governance bisa diartikan sebagai tata pemerintahan yang baik atau positif.

Good Governance adalah suatu proses yang mengorientasikan pemerintahan pada distribusi kekuatan dan kewenangan yang merata pada seluruh elemen masyarakat untuk mempengaruhi keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengan kehidupan publik beserta seluruh upaya pembangunan politik, ekonomi, sosial dan budaya mereka dalam sistem pemerintahan (Sinambela, 2006 : 47).

Menurut Sedarmayati (2003:76) good governance adalah suatu bentuk manajemen pembangunan, yang juga disebut administrasi pembangunan. Dengan demikian ia berpendapat bahwa pemerintah berada pada posisi sentral (agent of change) dari suatu masyarakat dalam suatu masyarakat berkembang. Dalam good governance tidak hanya pemerintah, tetapi juga citizen, masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat yang

terorganisir, seperti LSM, asosiasi-asosiasi kerja, bahkan paguyuban.a

Menurut Zulkarnain (2002:21) good governance merupakan sesuatu yang baru bagi masyarakat Indonesia, dimana aplikasi dari pada konsep ini seringkali tergantung pada kerjasama pemerintah dan masyarakat untuk mencapai dua tujuan yaitu pemerintah yang bersih dan demokratis. Dijelaskan pula bahwa terjadinya krisis disebabkan banyaknya penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan yang telah merusak sendi-sendi penyelenggaraan Negara dan berbagai sendi kehidupan nasional.

Di sisi lain istilah good governance menurut Dwi Payana (2003:45) merupakan sesuatu yang sulit didefinisikan karena di dalamnya terkandung makna etis. Dalam artian bahwa sesuatu yang dipandang baik dalam suatu masyarakat, namun bagi masyarakat lainnya belum tentu mendapat penilaian yang sama.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan good governance adalah merupakan sistem tata kelola yang baik sehubungan dengan pelayanan terhadap masyarakat luas.

Governance menunjuk pada pengertian bahwa kekuasaan tidak lagi semata-mata dimiliki atau menjadi urusan pemerintah, tetapi lebih menekankan pada pelaksanaan fungsi governing secara bersama-sama oleh pemerintah dan institusi-institusi lain, yakni Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), perusahaan swasta maupun warga negara. Setiap perusahaan atau entitas usaha harus

memastikan bahwa prinsip good governance diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran. Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) memaparkan prinsip-prinsip good governance yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kesetaraan dan kewajaran diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan.

Terciptanya suatu pemerintahan yang baik (good governance) atau pemerintahan seperti apa yang diharapkan oleh masyarakat diperlukan suatu sistem yang memungkinkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.

Keraf dan Akadun mengartikan good governance sebagai adanya dan berfungsi baiknya beberapa perangkat kelembagaan sedemikian rupa sehingga memungkinkan kepentingan masyarakat bisa dijamin dengan baik (Kartika dkk, 2012:11).

Peran pemerintah dalam menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sektor swasta sebagai pendorong terciptanya perluasan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat, sedangkan masyarakat berpartisipasi secara aktif dalam aktifitas ekonomi, sosial, dan politik.

Tiga prinsip utama yang mendasari penerapan good governance adalah transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dan efektivitas. Ketiga prinsip dasar ini merupakan prinsip yang berlaku

secara universal State Society Private Sectore (Adisasmita, 2011:38). Senada dengan hal tersebut Gambir Bhatta mengungkapkan bahwa unsur utama governance yaitu akuntabilitas (accountability), transparansi (transparency), keterbukaan (openness), dan aturan hukum (rule of law) ditambah dengan kompetensi manajemen (management competence) dan hak-hak asasi manusia (human right) (Mustafa 2013:190).

Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Asosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), dan Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI) terdapat 10 prinsip tata pemerintahan yang baik yaitu:

1. Partisipasi, dalam arti bahwa setiap warga didorong untuk menggunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung mau pun tidak langsung.
2. Penegakan Hukum, yaitu menegakkan hukum secara adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM, dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
3. Transparansi, yakni menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui pelayanan penyediaan informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

4. Kesetaraan, yakni memberi peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan
5. Daya Tangkap, yakni meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintahan terhadap anspirasi masyarakat tanpa kecuali
6. Wawasan ke Depan, yaitu membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga masyarakat dalam seluruh proses pembangunan, sehingga warga masyarakat dalam seluruh proses pembangunan, sehingga warga masyarakat memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya.
7. Akuntabilitas, yaitu meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat yang luas.
8. Pengawasan, yaitu meningkatkan upaya pengawasan terhadap penyelenggara pemerintahan dan pembangunan yang dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas.
9. Efisiensi dan Efektivitas yaitu menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.
10. Profesionalisme, meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau (Handoyo, 2010:93).

Sementara Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) memaparkan prinsip-prinsip good governance antara lain:

1. Transparansi (Transparency)

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan atau entitas usaha harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya. Pedoman pokok dalam pelaksanaan prinsip Transparansi ini adalah sebagai berikut:

- Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.
- Informasi yang harus diungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan good governance serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan.

- Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.
- Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.

2. Akuntabilitas (Accountability)

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Pedoman pokok dalam pelaksanaan prinsip Akuntabilitas ini adalah sebagai berikut:

- Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan.
- Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kompetensi sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan Good Governance.

- Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan.
- Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan nilai-nilai perusahaan, sasaran utama dan strategi perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (reward and punishment system).
- Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku (code of conduct) yang telah disepakati

3. Responsibilitas (Responsibility)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen. Pedoman pokok dalam pelaksanaan prinsip Responsibilitas ini adalah sebagai berikut:

- Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan (by-laws).
- Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian

lingkungan terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.

4. Independensi (Independency)

Untuk melancarkan pelaksanaan asas good governance, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Pedoman pokok dalam pelaksanaan prinsip Independensi ini adalah sebagai berikut:

- Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif.
- Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain sehingga terwujud sistem pengendalian internal yang efektif.

5. Kesetaraan dan Kewajaran (Fairness)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan bersama berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran. Pedoman pokok dalam pelaksanaan prinsip Kesetaraan dan Kewajaran ini adalah sebagai berikut:

- Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing.
- Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.
- Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, jender, dan kondisi fisik.

United Development Program (UNDP,1997) mengemukakan bahwa karakteristik atau prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan yang baik, meliputi:

1. Partisipasi (Participation)

Setiap orang atau warga masyarakat, baik laki-laki mau pun perempuan memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung, mau pun melalui lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing.

2. Aturan Hukum (Rule Of Law)

Kerangka aturan hukum dan perundang-undangan harus berkeadilan, ditegakkan dan dipatuhi secara utuh, terutama aturan hukum tentang hak asasi manusia.

3. Transparansi (Transparency)

Transparansi harus dibangun dalam rangka kebebasan aliran informasi

4. Daya Tanggap (Responsiveness)

Setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders)

5. Berorientasi Konsensus (Consensus Orientation)

Pemerintahan yang baik akan bertindak sebagai penengah bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus atau kesempatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak dan jika dimungkinkan juga dapat diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah.

6. Berkeadilan (Equity)

Pemerintahan yang baik akan memberi kesempatan yang baik terhadap laki-laki mau pun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.

7. Efektivitas dan Efisiensi (Effectiveness And Efficiency)

Setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan

kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya berbagai sumber-sumber yang tersedia.

8. Akuntabilitas (Accountability)

Para pengambil keputusan dalam organisasi sektor publik, swasta, dan masyarakat madani memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada publik (masyarakat umum), sebagaimana halnya kepada para pemilik (stakeholders).

9. Visi Strategis (Strategic Vision)

Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, bersamaan dengan dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan tersebut (Mustafa, 2013:190).

Sedangkan menurut OECD (Organization for Economic Co-operation and Development), menyebutkan ada empat unsur penting dalam good governance, yaitu:

1. Fairness (Keadilan)

Prinsip Keadilan dapat diartikan sebagai perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, terutama untuk menjamin perlindungan hak-hak para pemegang saham, termasuk hak-hak pemegang saham minoritas dan para pemegang saham asing, serta menjamin terlaksananya komitmen dengan para investor Good governance dimaksudkan untuk mengatasi masalah yang timbul dari

adanya perbedaan kepentingan antara pemegang saham sebagai principal, dengan manajemen sebagai agen

2. Transparency (Transparansi)

Prinsip dasar transparansi menunjukkan tindakan perusahaan untuk dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh seluruh Stakeholders. Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas, dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, dan kepemilikan perusahaan

3. Accountability (Akuntabilitas)

Prinsip dasar Akuntabilitas menekankan kepada pentingnya penciptaan sistem pengawasan yang efektif berdasarkan pembagian kekuasaan antara Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham yang meliputi monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap manajemen untuk meyakinkan bahwa manajemen bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan pihak yang berkepentingan lainnya.

Prinsip Akuntabilitas juga menjelaskan peran dan tanggung jawab, serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbangan kepentingan manajemen dan pemegang saham, sebagaimana yang diawasi oleh Dewan Komisaris.

4. Responsibility (Pertanggungjawaban)

Prinsip Responsibility diartikan sebagai tanggung jawab perusahaan untuk memastikan dipatuhinya peraturan serta ketentuan yang berlaku sebagai cerminan dipatuhinya nilai-nilai sosial

Sedangkan menurut Azizy (2007:29) senada dengan solihin terdapat empat belas nilai yang menjadi prinsip tata pemerintahan yang baik, yaitu:

1) Wawasan ke Depan (Vision)

Dalam melaksanakan kegiatannya, Pemerintah harus memiliki visi dan strategi yang jelas dan mapan dengan menjaga kepastian hukum, adanya kejelasan setiap tujuan kebijakan dan program, serta adanya dukungan dari pelaku untuk mewujudkan visi.

2) Keterbukaan dan Transparansi (Openness and Transparency)

Untuk melancarkan pelaksanaan good governance, Pemerintah harus memastikan bahwa tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan publik, serta adanya akses pada informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas diperoleh, dan tepat waktu.

3) Partisipasi Masyarakat (Participation)

Prinsip ini menunjukkan adanya pemahaman penyelenggara negara tentang proses/metode partisipatif serta

adanya pengambilan keputusan yang didasarkan atas konsensus bersama.

4) Tanggung Jawab (Accountability)

Dalam melaksanakan kegiatannya, Pemerintah harus memastikan adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan serta adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan.

5) Supremasi Hukum (Rule of Law)

Untuk melancarkan pelaksanaan good governance, Pemerintah harus menjamin adanya kepastian dan penegakan hukum, adanya penindakan terhadap setiap pelanggar hukum, serta adanya pemahaman mengenai pentingnya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan.

6) Demokrasi (Democracy)

Prinsip ini menunjukkan adanya kebebasan dalam menyampaikan aspirasi dan berorganisasi, serta adanya kesempatan yang sama bagi anggota masyarakat untuk memilih dan membangun konsensus dalam pengambilan keputusan kebijakan publik

7) Profesionalisme dan Kompetensi (Professionalism and Competency)

Dalam melaksanakan kegiatannya, Pemerintah harus berkinerja tinggi, taat asas, kreatif dan inovatif, serta memiliki kualifikasi di bidangnya.

8) Daya Tanggap (Responsiveness)

Prinsip ini menunjukkan bahwa dalam penerapan good governance, Pemerintah harus menyediakan layanan pengaduan dengan prosedur yang mudah dipahami oleh masyarakat, serta adanya tindak lanjut yang cepat dari laporan dan pengaduan.

9) Keefisienan dan Keefektifan (Efficiency and Effectiveness)

Dalam melaksanakan kegiatannya, Pemerintah harus menjamin terlaksananya administrasi penyelenggaraan negara yang berkualitas dan tepat sasaran dengan penggunaan sumberdaya yang optimal, adanya perbaikan berkelanjutan, dan berkurangnya tumpang tindih penyelenggaraan fungsi organisasi/unit kerja.

10) Desentralisasi (Decentralization)

Untuk melancarkan pelaksanaan good governance, Pemerintah harus menjamin adanya kejelasan pembagian tugas dan wewenang dalam berbagai tingkatan jabatan.

11) Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan Masyarakat (Private and Civil Society Partnership)

Prinsip ini menunjukkan bahwa dengan penerapan good governance maka akan adanya pemahaman aparat pemerintah

tentang pola-pola kemitraan, adanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat kurang mampu (powerless) untuk berkarya, terbukanya kesempatan bagi masyarakat/dunia usaha swasta untuk turut berperan dalam penyediaan pelayanan umum, serta adanya pemberdayaan institusi ekonomi lokal/usaha mikro, kecil, dan menengah

12) Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan (*Commitment to Reduce Inequality*)

Prinsip ini menunjukkan adanya langkah-langkah atau kebijakan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang kurang mampu (subsidi silang, affirmative action, dsb), tersedianya layanan- layanan/fasilitas-fasilitas khusus bagi masyarakat tidak mampu, adanya kesetaraan dan keadilan gender, dan adanya pemberdayaan kawasan tertinggal.

13) Komitmen pada Perlindungan Lingkungan Hidup (*Commitment to Environmental Protection*)

Prinsip ini menjelaskan adanya keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan/konservasinya, penegakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, rendahnya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan, dan rendahnya tingkat pelanggaran perusakan lingkungan.

14) Komitmen pada Pasar yang Fair (*Commitment to Fair Market*)

Untuk melancarkan pelaksanaan good governance, Pemerintah harus memastikan tidak adanya praktek monopoli, berkembangnya ekonomi masyarakat, dan terjaminnya iklim kompetisi yang sehat

Konsep good governance akan dapat diimplementasikan sesuai dengan prinsip-prinsip di atas bila pemerintah telah mempunyai mekanisme untuk melakukan itu semua. Dalam hal ini, Sinambela (2006:51) mengingatkan bahwa ada 8 (delapan) kriteria yang harus dipenuhi untuk dapat menghasilkan mekanisme yang menghasilkan good governance. Kriteria-kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

1. Adanya legitimasi dari dukungan yang kuat dari masyarakat terhadap institusi publik baik yang berwujud sebagai lembaga birokrasi maupun institusi lainnya yang dibentuk masyarakat secara swadaya.
2. Adanya kebebasan dalam berpendapat untuk menyampaikan aspirasi atau kepentingan bagi setiap institusi ataupun kelompok masyarakat yang ada sehingga seluruh stake holders tersebut dapat berpartisipasi aktif dalam semua proses pembangunan.
3. Adanya keadilan serta kerangka legal berupa kepastian hukum untuk menjamin upaya penegakan keadilan tersebut.
4. Adanya akuntabilitas dan transparansi dalam mekanisme birokrasi.
5. Tersedianya informasi pembangunan yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah dan bebas.

6. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam penyediaan pelayanan publik.
7. Terbentuknya kerja sama yang baik antara Pemerintah dan civil society organization.
8. Tersedianya kesempatan luas untuk mengoreksi, memperbaiki, dan atau menganulir setiap kebijakan pemerintahan dan pembangunan, karena pada kenyataan tidak bersesuaian dengan kepentingan masyarakat lokal, nasional, regional, ataupun dalam konteks kepentingan global.

2.1.4. Tujuan Penerapan Good Governance

Secara sederhana FCGI (*Forum for Corporate Governance in Indonesia*) menyatakan bahwa tujuan dari good governance adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan. Forum ini menegaskan bahwa penerapan dari good governance bertujuan untuk memastikan bahwa sasaran perusahaan yang ditetapkan telah tercapai dan aset perusahaan terjaga dengan baik. Tujuan lainnya adalah agar perusahaan dapat menjalankan praktik-praktik usaha yang sehat, kegiatan yang transparan dan terjaganya keseimbangan antara upaya pencapaian tujuan ekonomi dengan tujuan sosial-ekonomi perusahaan (Jubaedah: 2007).

Good Governance lebih menekankan kepada proses, sistem, prosedur, peraturan yang formal ataupun informal yang menata suatu organisasi dimana aturan main yang ada harus diterapkan dan ditaati. Selain itu good governance lebih diarahkan kepada peningkatan efisiensi

dan efektifitas dalam hal pemakaian sumber daya organisasi yang sejalan dengan tujuan organisasi.

Menurut Khairandy (2007) manajemen tidak cukup hanya memastikan bahwa proses pengelolaan manajemen berjalan dengan efisien. Diperlukan instrumen baru, yaitu good governance untuk memastikan bahwa manajemen berjalan dengan baik. Dalam penerapan good governance ini ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini yaitu, pertama, pentingnya hak untuk memperoleh informasi dengan benar (akurat) dan tepat pada waktunya. Kemudian yang kedua yaitu kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (disclosure) secara akurat, tepat waktu, dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan stakeholder.

Menurut Daniri (2006), mengutip dari Tri Gunarsih (2003) Good Governance memberikan manfaat dalam meningkatkan kinerja perusahaan melalui supervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku.

Dengan menerapkan good governance suatu entitas diharapkan dapat:

1. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi suatu entitas dalam usahanya mencapai tujuan entitas tersebut.
2. Meningkatkan nilai suatu entitas sekaligus dapat meningkatkan citra entitas tersebut kepada publik luas dalam jangka panjang.
3. Melindungi hak dan kewajiban dari para stakeholders.

4. Memberikan kerangka acuan yang memungkinkan pengawasan dapat berjalan secara efektif sehingga tercipta mekanisme checks and balances di suatu entitas.

Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, tujuan dari good governance adalah:

1. Birokrasi yang bersih, adalah birokrasi yang sistem dan aparaturnya bekerja atas dasar aturan dan koridor nilai-nilai yang dapat mencegah timbulnya berbagai tindak penyimpangan dan perbuatan tercela seperti korupsi, kolusi dan nepotisme.
2. Birokrasi yang efisien, efektif dan produktif, adalah birokrasi yang mampu memberikan dampak kerja positif (manfaat) kepada masyarakat dan mampu menjalankan tugas dengan tepat, cermat, berdayaguna dan tepat guna (hemat waktu, tenaga, dan biaya).
3. Birokrasi yang transparan, adalah birokrasi yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan tidak diskriminatif dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara.
4. Birokrasi yang melayani masyarakat, adalah birokrasi yang tidak minta dilayani masyarakat, tetapi birokrasi yang memberikan pelayanan prima kepada publik.
5. Birokrasi yang akuntabel, adalah birokrasi yang bertanggungjawab atas setiap proses dan kinerja atau hasil akhir dari program

maupun kegiatan, sehubungan dengan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan untuk mencapai tujuan.

Good Governance berorientasi kepada suatu proses, sistem, prosedur dan peraturan yang membuat suatu entitas bertindak dengan suatu kerangka atau panduan dalam rangka untuk mencapai tujuannya dengan meningkatkan efektifitas dan efesiensi dalam penciptaan kesinambungan antara tujuan ekonomis dan tujuan sosial, selain itu good governance dapat mengusahakan keseimbangan antara berbagai kepentingan yang dapat memberi keuntungan bagi suatu entitas secara keseluruhan

2.2. Pengelolaan

2.2.1. Pengertian Pengelolaan

Secara umum pengelolaan sama halnya dengan manajemen yaitu penggerakan, pengorganisasian dan pengarahan suatu usaha terhadap manusia sehingga dapat dilakukan secara efektif dan efisien sehingga mencapai suatu tujuan. aktivitas manajemen dalam sebuah organisasi yang diarahkan untuk mencapai tujuan organisasi tersebut secara efektif dan efisien. Manajemen adalah proses kerja sama antara seseorang atau kelompok tertentu terhadap sumber daya yang lainnya dalam mencapai suatu tujuan organisasi dan sebagai aktivitas dari manajemen. Kemudian dengan kata lain, aktivitas manajerial hanya ditemukan dalam wadah sebuah organisasi, baik organisasi bisnis, sekolah dan juga lainnya (Syarifudin di Astuti: 2014:34)

Ada pula pengertian lain manajemen mendefinisikan bahwa seni manajemen meliputi untuk melihat bagian dari totalitas yang terpisah-pisah serta dengan kemampuan yang dapat menciptakan gambaran atau peristiwa tentang suatu visi tersebut (Anton & Maya: 2014:32).

Kemudian ada yang berpendapat bahwa, manajemen adalah tindakan memikirkan dan mencapai hasil yang diinginkan melalui usaha dari kerja kelompok yang terdiri sebagai hal seperti tindakan dari mendayagunakan bakat manusia itu sendiri sehingga sumber daya manusia secara singkat dan dapat menyatakan tindakan orang terhadap manajemen merupakan sebagai suatu tindakan melakukan perencanaan dan pengimplementasian.

Manajemen menurut Lilis Sulastri, mengutip dalam bukunya "Manajemen Sebuah Pengantar" (Sejarah, Tokoh, Teori dan Praktik:2016) mendefinisikan bahwa manajemen merupakan seni mengatur sehingga dapat melibatkan suatu proses, cara dan suatu tindakan tertentu, seperti halnya perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengawasan secara efektif dan efisien dengan mencapai suatu tujuan bersama. Manajemen adalah proses kerja sama antara individu dan yang lain untuk mencapai sebuah tujuan bersama. Pendapat diatas, disimpulkan bahwa manajemen adalah sebuah proses kerja sama antara dua orang atau lebih dengan tujuan yang sama. Sehingga pengertian manajemen dikemukakan oleh Martayo, menurutnya manajemen merupakan usaha yang dapat menentukan, menginterpretasikan dan mencapai tujuan organisasi dengan melakukan pelaksanaan dan fungsi-fungsi perencanaan,

pengorganisasian, penyusunan personal atau kekaryawanan, pengarahan dan kepemimpinan serta dengan pengawasan tersebut

Setiap ahli memberikan pandangan berbeda tentang batasan manajemen, dikarenakan tidak mudah memberi arti universal yang dapat diterima dan disetujui semua orang. Dengan demikian dari pemikiran semua ahli tentang definisi manajemen kebanyakan mengemukakan bahwa manajemen itu adalah proses tertentu yang bisa menggunakan kemampuan atau keahlian dalam mencapai sesuatu tujuan yang didalamnya pelaksanaannya yang dapat mengikuti alur keilmuan secara fisik ilmiah dan dapat pula menciptakan kekhasan atau gaya seorang manajer dalam melakukan mendayagunakan kemampuan orang lain tersebut. Istilah manajemen ini sudah populer dalam hidup dan kehidupan organisasi.

Dalam arti yang sederhana (manajemen) diartikan sebagai mengatur. Suatu proses mengatur suatu organisasi dalam bentuk untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai dan dipahami sebagai suatu manajemen (Syafaruddin & Nurmawati: 2011:123).

Sedangkan menurut Ulber Silalahi (2011) mendefinisikan bahwa manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengatur sumber daya, pengomunikasian, pemimpin, pemotivasian, dan pengendalian pelaksanaan tugastugas dan penggunaan sumber-sumber untuk mencapai tujuan organisasional secara efektif dan secara efisien.

Sementara itu, George R. Terry seperti yang dikutip Syafaruddin (2015) menjelaskan bahwa manajemen adalah kemampuan mengarahkan

dan mencapai hasil yang diinginkan dengan tujuan dari usaha-usaha manusia dan sumber daya lainnya.

Tegasnya dalam menjalankan manajemen harus melibatkan alokasi dan pengawasan uang, sumber daya manusia itu sendiri, dan fisik sehingga dapat mencapai tujuan yang diterapkan. Sebagai ilmu, manajemen mempunyai suatu pendekatan sistematis yang selalu digunakan dalam memecahkan suatu masalah. Pendekatan manajemen bertujuan untuk menganalisis proses, membuat kerangka konseptual kerja, mengidentifikasi prinsip-prinsip yang mendasar sehingga dapat membangun teori dalam manajemen dengan melakukan pendekatan. Oleh karena itu, manajemen merupakan suatu proses universal yang dimana berkenaan dengan adanya lembaga, berbagai posisi dalam lembaga tersebut, atau sebuah pengalaman pada lingkungan yang beragam luasnya antara dengan persoalan kehidupan. Berdasarkan suatu penegasan yang tercantum diatas, maka bisa dikatakan bahwa manajemen berisikan unsur-unsur: struktur organisasi yang teratur, terarah pada tujuan dan sasaran, dilakukan berdasarkan usaha manusia, dan menggunakan system dan prosedur. Manajemen merupakan proses dimana pengaturan tersebut dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki organisasi berdasarkan kerjasama anggota dalam mencapai tujuan organisasi. Sehingga manajemen dapat diartikan sebagai perilaku keanggotaan dalam bentuk suatu organisasi untuk mencapai tujuannya.

Terdapat tiga fokus untuk mengartikan manajemen yaitu: 1. Manajemen adalah sesuatu dari kemampuan suatu keahlian yang akan

menjadi cikal bakal manajemen sebagai profesi. Manajemen adalah suatu ilmu yang menekankan pada perhatian keterampilan dan kemampuan manajerial yang dapat diklarifikasikan menjadi sebuah kemampuan/keterampilan teknis, manusiawi yang dalam bentuk konseptual. 2. Manajemen adalah suatu bentuk proses yaitu dengan melakukan langkah yang sistematis dan terpadu sebagai tujuan aktivitas manajemen. 3. Manajemen adalah seni yang sebagaimana tercermin dari banyaknya perbedaan gaya (style) seorang dalam melakukan atau memberdayakan orang lain sehingga dapat mencapai tujuan tersebut.

Prinsip suatu manajemen adalah berdasarkan informasi. sehingga banyak aktivitas manajemen yang dapat membutuhkan data dan informasi secara cepat, lengkap, dan akurat. Suatu aktivitas pengambilan keputusan didukung oleh informasi yang begitupun untuk melaksanakan kegiatan rutin dan incidental sehingga diperlukan informasi yang telah di rencanakan sedemikian rupa agar memudahkan seorang manajer dan pengguna mengakses dan mengelola informasi. Kehadiran suatu manajemen dalam organisasi adalah sebagai hal yang untuk melaksanakan pekerjaan agar suatu bentuk tujuan dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Dengan tegas tidak ada bentuk rumusan yang dapat sama dan berlaku secara umum untuk fungsi manajemen. Dengan demikian, fungsi manajemen dapat ditelaah dari aktifitas-aktifitas utama yang akan dilakukan para manajer tersebut yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian.

Dilakukannya manajemen sebagai pelaksanaan suatu usaha terencana secara baik sistematis dan dapat dievaluasi dengan benar, akurat dan lengkap sehingga mencapai sebuah tujuan secara produktif, berkualitas, efektif dan efisien. Produktivitas merupakan sebuah perbandingan antara hasil yang didapatkan (out put) dengan jumlah sumber yang dipergunakan (input). Produktivitas bisa dikatakan secara kuantitas maupun kualitas out put nya berupa jumlah tamatan dan kuantitas input berupa jumlah banyaknya tenaga kerja dan sumber daya selebihnya. Kualitas berpengaruh pada kualitas suatu ukuran penilaian atau penghargaan yang diberikan dan dikenakan kepada barang (products) dan jasa (service) tersebut yang berdasarkan pada timbangan suatu objek atas bobot dan kinerja tersebut. Efektifitas sebagai ukuran terhadap keberhasilan suatu tujuan organisasi. Etzioni mengemukakan bahwa keefektifan merupakan hal derajat sebuah organisasi dalam mencapai tujuan. Sedangkan menurut Sergiovani yaitu kesesuaian hasil yang akan dicapai oleh organisasi dengan mencapai tujuan. Efektifitas berkaitan dengan institusi pendidikan yang terdiri dari dimensi manajemen dan kepemimpinan sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan personil lainnya, siswa, kurikulum, sarana prasarana, pengelolaan kelas, hubungan sekolah dan masyarakat, pengelolaan bidang khusus lainnya yang menghasilkan sesuatu yang nyata dan merujuk kepada hasil yang diperoleh bahkan menunjukkan kedekatan atau kemiripan antara hasil yang nyata dengan sesuatu yang diharapkan. Efisiensi adalah sesuatu yang berkaitan dengan cara membuat sesuatu dengan benar. (doing thing right) sementara

efektifitas merupakan hal yang menyangkut tujuan (doing the right thing) atau efektifitas sebagai perbandingan antara rencana dengan tujuan yang harus dicapai, efisiensi lebih ditekankan kepada perbandingan antara input sumber daya manusia dengan out put. Sehingga suatu kegiatan dapat dikatakan efisien bila tujuan tersebut dapat tercapai secara optimal dengan menggunakan atau pemakaian sumber daya yang minimal. Efisiensi pendidikan merupakan sebagaimana tujuan itu tercapai dengan memiliki tingkat efisien waktu, biaya, tenaga dan praarana.

Kesimpulannya adalah dengan mencapai suatu tujuan bersama, kehadiran suatu manajemen pada sebuah organisasi dan lembaga merupakan sesuatu yang sangat penting, dikarenakan akan dilakukannya manajemen agar pelaksanaan suatu usaha kerja dapat terencana secara baik sistematis dan dapat di evaluasi secara baik, akurat, dan lengkap sehingga mencapai tujuan secara produktif, berkualitas dan efisiensi

2.2.2. Unsur-Unsur Manajemen

Untuk mencapai sebuah tujuan yang telah direncanakan dan ditetapkan, seorang manajer sangat membutuhkan sarana manajemen yang disebut dalam bentuk unsur manajemen. Menurut pendapat Manullang (2008) mengemukakan bahwa dikutip dari Mastini tentang unsur manajemen tersebut, terdiri atas manusia, material, mesin, metode, money dan markets, setiap didalam unsur-unsur tersebut memiliki penjelasan dan peranan bagi suatu manajemen agar dapat mengetahui bahwa bentuk manajemen itu memiliki unsur-unsur yang perlu di manfaatkan oleh manajemen tersebut.

a) Manusia (Man)

Sarana penting atau sarana utama setiap manajer untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh individu-individu tersendiri atau manusianya. Berbagai kegiatan-kegiatan yang dapat diperbuat dalam mencapai tujuan seperti yang dapat ditinjau dari sudut pandang proses, perencanaan, pengorganisasian, staffing, pengarahan, dan pengawasan atau dapat pula kita tinjau dari sudut bidang, seperti penjualan, produksi, keuangan dan personalia. Man atau manusia ataupun juga sering diistilahkan dengan sumber daya manusia dalam dunia manajemen merupakan faktor yang sangat penting dan menentukan. Manusia yang merancang tujuan, menetapkan tujuan dan manusia jugalah yang nantinya akan menjalankan proses dalam mencapai tujuan yang ditetapkan tersebut. Sudah jelas, tanpa adanya manusia maka tidak akan pernah ada proses kerja karena manusia pada dasarnya adalah mahluk kerja.

b) Material (Material)

Dalam proses pelaksanaan kegiatan, manusia menggunakan material atau bahan-bahan. Oleh karena itu, material dianggap pula sebagai alat atau sarana manajemen untuk mencapai tujuan.

c) Mesin (Machine)

Dalam kemajuan teknologi, manusia bukan lagi sebagai pembantu mesin seperti pada masa lalu sebelum Revolusi Industri

terjadi. Bahkan, sebaliknya mesin telah berubah kedudukannya menjadi pembantu manusia.

d) Metode (Method)

Untuk melakukan kegiatan secara guna dan berhasil guna, manusia dihadapkan kepada berbagai alternatif metode cara menjalankan pekerjaan tersebut sehingga cara yang dilakukannya dapat menjadi sarana atau alat manajemen untuk mencapai tujuan.

e) Uang (Money)

Uang sebagai sarana manajemen harus digunakan sedemikian rupa agar tujuan yang diinginkan tercapai. Kegiatan atau ketidaklancaran proses manajemen sedikit banyak dipengaruhi oleh pengelolaan keuangan.

f) Pasar (Markets)

Bagi badan yang bergerak dibidang industri maka sarana manajemens penting lainnya seperti pasar-pasar atau market. Untuk mengetahui bahwa pasar bagi hasil produksi jelas tujuan perusahaan industri tidak mustahil semua itu dapat diurai sebagian dari masalah utama dalam perusahaan industri adalah minimal mempertahankan pasar yang sudah ada. Jika mungkin, mencari pasar baru untuk hasil produksinya. Oleh karena itu, market merupakan salah satu sarana manajemen penting lainnya. baik bagi perusahaan industri maupun bagi semua badan yang bertujuan untuk mencari laba (Agustina: 2007).

Dari unsur-unsur manajemen di atas dapat dijelaskan, bahwa manusia adalah unsur dan sarana utama sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan. Berbagai pekerjaan yang dilakukan dalam mencapai sebuah tujuan seperti dari sudut pandang proses, perencanaan, pengorganisasian, staffing, pengarahan, dan pengawasan yang hanya didapatkan dan dilakukan oleh manusia atau sering diistilakan dengan sumber daya manusia itu sendiri sehingga di dalam dunia ini manajemen merupakan kegiatan yang sangat penting keberadaannya dan dapat menentukan.

2.2.3. Fungsi-Fungsi Manajemen

Sifat dasar manajemen adalah sangat beragam, karena mencakup banyak dimensi aktivitas dan lembaga. Manajemen berhubungan dengan semua aktivitas organisasi dan dilaksanakan pada semua level organisasi. Karena itu manajemen bukan merupakan sesuatu yang terpisah atau pengurangan fungsi suatu organisasi tidak hanya memiliki mengelola satu bidang tetapi juga sangat luas sebagai contoh: bidang produksi, pemasaran, keuangan atau personal. Dalam hal ini manajemen suatu proses umum terhadap semua fungsi lain yang dilaksanakan dalam organisasi. Tegasnya manajemen adalah suatu perpaduan aktivitas. Aktivitas manajemen adalah sesuatu yang mencakup spektrum yang sangat luas jangkauannya, dikarenakan itu dimulai dari bagaimana cara menentukan arah sebuah organisasi dimasa

akan datang, sampai mengawasi kegiatan untuk mencapai tujuan. Maka dalam rangka menciptakan tujuan sebuah organisasi perlu secara efektif dan efisien. manajemen harus difungsikan sepenuhnya pada setiap organisasi (Syarifudin: 2016), adapun fungsi-fungsi manajemen dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Perencanaan

Perencanaan adalah sesuatu kegiatan yang penting yang perlu dibuat untuk setiap usaha dalam rangka mencapai suatu tujuan. Sehingga sering kali suatu pelaksanaan kegiatan akan mengalami pengaruh kesulitan dalam mencapai sebuah tujuan tanpa adanya suatu perencanaan. Kesulitan yang terjadi dapat berupa penyimpangan suatu arah dari pada tujuan tersebut, sehingga ada pemborosan modal yang mengakibatkan gagalnya semua kegiatan dalam mencapai suatu tujuan.

2) Pengorganisasian

Penempatan dari fungsi pengorganisasian dari fungsi suatu perencanaan sehingga terjadi hal yang logis itu dikarenakan tindakan pengorganisasian yang menjenbatani suatu kegiatan perencanaan dengan pelaksanaannya. Proses rencana yang sudah tersusun secara sistematis dan dapat ditetapkan berdasarkan perhitungan-perhitungan, sehingga tidak dengan sendirinya dari proses pendekatan organisasi yang pada tujuannya hendak dicapainya. Ia membutuhkan aturan-aturan yang saja hanya menyangkut suatu wadah yang dimana kegiatan-kegiatan dapat

dilaksanakan, namun suatu aturan harus ditaati dan dipahami oleh setiap orang dalam organisasi tersebut. Dengan demikian, tanpa suatu pengorganisasian memungkinkan suatu perencanaan dapat dicapai dengan tujuan tertentu, dan juga tanpa suatu pengorganisasian para pelaku pelaksana tidak berhak memiliki pedoman yang jelas dan tegas dikarenakan terjadinya pemborosan yang akan melukai pelaksanaan suatu rencana yang berakibat adalah suatu kegagalan dalam mencapai tujuan.

Setelah mendapat kepastian dari suatu tujuan, sumber daya dan teknik/metode yang akan digunakan dalam mencapai suatu tujuan tersebut, sehingga manajer melakukan upaya pengorganisasian agar suatu proses rencana tersebut bisa dikerjakan oleh ahlinya secara sukses.

2.3. Kerangka Pikir

Menyadari akan pentingnya air bersih bagi keberlangsungan kehidupan manusia baik di perkotaan maupun di pedesaan, maka menjadi urgen untuk mengelola air bersih terutama pengelolaan air bersih di Kota Palopo. Dimana menurut observasi yang peneliti lakukan, pengelolaan air bersih di Kota Palopo masih belum optimal. Masih belum teraturnya waktu penyaluran air ke masyarakat, tidak lancarnya aliran air, banyaknya pipa yang bocor, dan sebagainya.

Pemerintah Kota Palopo melalui PERUMDA Tirta Mangkaluku Kota Palopo sebagai lembaga yang mengurus penyaluran air bersih di Kota Palopo belum terlalu serius dalam mengelola air bersih. Maka

melalui penelitian ini, peneliti akan mendeskripsikan bagaimana Penerapan Good Governance dalam Pengelolaan Sektor Air Bersih di PERUMDA Tirta Mangkaluku Kota Palopo.

Gambar 2.1. Bagan Kerangka Pikir

